



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 13 JANUARI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



Pemkab Perbaiki Empat Rumah Tidak Layak Huni di Tiga Kecamatan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus bergerak cepat memuntung persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Terbaru, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyerahkan perbaikan empat unit RTLH yang tersebar di tiga kecamatan dan rampung pada Januari 2026.

"Hal tersebut dilakukan Bupati Subandi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi RTLH, Minggu sore (11/12), la menyebutkan, sepanjang Januari ini Pemkab Sidoarjo telah memperbaiki sedikitnya 10 unit rumah tidak layak huni."

"Januari ini saja perbaiki ada 10 RTLH yang kami perbaiki. Hari ini saya cek lagi empat rumah di tiga kecamatan untuk segara diesekusi," ujar Subandi.

Empat rumah yang menjadi sasaran perbaikan masing-masing berada di Desa Ketimang, Kecamatan Wonoyayu, Desa Tropodo dan Kelurahan Krisi, Kecamatan Krisi serta Desa Sengkolo, Kecamatan Pakis.

Salah satu rumah yang dilunakkan adalah milik Siswanto, warga Desa Ketimang. Kondisi rumah

tersebut cukup memprihatinkan, dengan atap ruang tamu jebol serta lantai rumah yang lebh rendah dari permukaan jalan, sehingga kerap terendam banjir saat hujan turun. "Perbaikannya nanti meliputi atap, peninggian lantai agar tidak banjir, serta perbaikan kamar mandi," tegas Subandi.

Didampingi Wakil Ketua IV Banzas Sidoarjo, Ilyamuddin, Bupati Subandi meminta agar proses pengerjaan dilakukan secepat mungkin. Ia menekankan pentingnya percepatan karena kondisi rumah warga sudah membuatnya keselamatan, terutama saat musim hujan," perintahnya kepada pihak Banzas.

"Saya minta dulu sehat bulan ini, karena atapnya sudah tidak ada. Kasihan warga kalau hujan," perintahnya kepada pihak Banzas.

Sementara itu, Nurcholis (58), warga Dusun Klagen, Desa Tropodo, Senin (12/12) mengungkapkan rumah yang ia tempati sejak 1977 belum pernah divenos. Akibatnya, struktur bangunan kini rapuh dimakan usia.

"Kerusakan paling parah di bagian tengah sampai belakang. Saya terpaksa tidur di ruang tamu karena hanya itu bagian yang masih bisa ditempati," tuturnya.

Rasa syukur juga disampaikan Makrifa, istri Siswanto. Ia mengaku selama ini hanya bisa pasrah karena keterbatasan ekonomi, mengingat penghasilan suaminya sebagai petugas kebersihan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

"Mboten wonton arto (tidak ada uang), suami kerja cleaning service. Saya hanya ingin rumah segera diperbaiki supaya anak saya tidak kehujanan lagi," ucapanya haru.

Selain meninjau RTLH, dalam sidak tersebut Bupati Subandi juga menyulurkan bantuan berupa kewarganegaraan ASN dalam membangun Kabupaten Sidoarjo dan Banzas Sidoarjo.

Melalui program ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat memberikan solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini tinggal di hunian yang tidak aman dan membahayakan keselamatan. • Loe



Teguhkan Komitmen Bangun Daerah

Ribuan ASN Sidoarjo Ikuti Apel Akbar 2026

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo mengikuti Apel Akbar di GOR Sidoarjo, Senin (12/1). Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo dan Wakil Ketua IV Banzas.

Apel Akbar ini digelar sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen para ASN dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.

menjadi lebih baik ke depannya.

Bupati Subandi mengatakan, Apel Akbar ini tanda dimulainya langkah baris di tahun 2026. Ia menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan memberikan karya terbaik bagi bangsa, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo.

Kata Subandi, sebagai ASN, kita adalah pelayan publik. Tugas kita bukan sekadar menjalankan rutinitas, melainkan menghadirkan solusi, inovasi, dan pelajaran prima bagi masyarakat.

"Ingatlah, setiap sumber warga yang terlalu dengan baik adalah para

sekali prestasi kita bersama," tandas mantan Ketua Komisi I DPRD Sidoarjo ini.

Ia juga meminta agar tahun ini dijadikan momentum untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja melalui semangat kebersamaan. Target utama adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Subandi mengingatkan ASN Sidoarjo harus menjadi garda terdepan pembawa perubahan. Menurutnya, berasa tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga harus disertai den-

gan hati dan empati yang tinggi.

"Sidoarjo adalah rumah kita. Kekuatannya terbesar ASN dalam kebersamaan. Kita harus mampu membangun budaya kerja yang berintegritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kokoh," tambahnya.

Terkait dinamika organisasi, Bupati menjelaskan pelantikan pejabat yang baru saja dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo merupakan bagian dari rotasi pegawai berbasis kompetensi. Hal ini dilakukan untuk tetras memacu kinerja ASN di berbagai lini. (sta/rus)

6 MALANG-SIDOARJO-GRESIK

Bupati Pastikan Jembatan Banjarsari Aman

Pekerja Docking Kapal



ADRIEN SEPTEMBER 2025

Tanggapi Keluhan Retakan Aspal

SIDOARJO - Projek pembangunan jembatan Banjarsari di Kecamatan Banjarsari telah rampung sejak September 2025. Namun, keluhan tentang retakan sepanjang sekitar 10 meter di bagian atas jembatan tersebut masih berlangsung. Jembatan ini dibangun pada masa pemerintahan gubernur Jawa Timur saat itu yakni Gubernur PT. Wadih Kurniadi (1995-1999).

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan bahwa retakan tersebut merupakan hasil perbaikan atas perbaikan sebelumnya yang dilakukan oleh kontraktor polkova PT. BPSF pada RP5000 kewajiban namun Keterangan: "Seluruh jembatan di atas jembatan Banjarsari segera dimulai setelah selesai setiap konstruksi jalan, sebaliknya setiap



Republika Online | Foto: Istimewa

berlusuk lokal segera berkoordinasi dengan pihak berwenang setelah selesai setiap konstruksi jalan, sebaliknya setiap



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LOEFE/DUTA

Bupati Sidoarjo Subandi saat melakukan sidak RTLH di tiga kecamatan

Pemkab Perbaiki Empat Rumah Tidak Layak Huni di Tiga Kecamatan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus bergerak cepat menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Terbaru, Bupati Sidoarjo H. Subandi menargetkan perbaikan empat unit RTLH yang tersebar di tiga kecamatan dapat rampung pada Januari 2026.

Hal tersebut disampaikan Bupati Subandi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi RTLH, Minggu sore (11/1/26). Ia menyebutkan, sepanjang Januari ini Pemkab Sidoarjo telah memperbaiki sedikitnya 10 unit rumah tidak layak huni.

"Januari ini saja sudah ada 10 RTLH yang kami perbaiki. Hari ini saya cek lagi empat rumah di tiga kecamatan untuk segera dieksekusi," ujar Subandi.

Empat rumah yang menjadi sasaran perbaikan masing-masing berada di Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu; Desa Tropodo dan Kelurahan Krian, Kecamatan Krian; serta Desa Sawohan, Kecamatan Buduran.

Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Siswanto, warga Desa Ketimang. Kondisi rumah

tersebut cukup memprihatinkan, dengan atap ruang tamu jebol serta lantai rumah yang lebih rendah dari permukaan jalan, sehingga kerap terendam banjir saat hujan turun.

"Perbaikannya nanti meliputi atap, peninggian lantai agar tidak banjir, serta perbaikan kamar mandi," tegas Subandi.

Didampingi Wakil Ketua IV Baznas Sidoarjo, Ilhamuddin, Bupati Subandi meminta agar proses pengerjaan dilakukan secepat mungkin. Ia menekankan pentingnya percepatan karena kondisi rumah warga sudah membahayakan keselamatan, terutama saat musim hujan.

"Saya minta diusahakan bulan ini, karena atapnya sudah tidak ada. Kasihan warga kalau hujan," perintahnya kepada pihak Baznas.

Sementara itu, Nurcholis (58), warga Dusun Klagen, Desa Tropodo, Senin (12/1/26) mengungkapkan rumah yang ia tempati sejak 1977 belum pernah direnovasi. Akibatnya, struktur bangunan kini rapuh dimakan usia.

"Kerusakan paling parah di bagian tengah sampai belakang.

Saya terpaksa tidur di ruang tamu karena hanya itu bagian yang masih bisa ditempati," tuturnya.

Rasa syukur juga disampaikan Makrina, istri Siswanto. Ia mengaku selama ini hanya bisa pasrah karena keterbatasan ekonomi, mengingat penghasilan suaminya sebagai petugas kebersihan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

"Mboten wonten arto (tidak ada uang), suami kerja cleaning service. Saya hanya ingin rumah segera diperbaiki supaya anak saya tidak kehujanan lagi," ucapnya haru.

Selain meninjau RTLH, dalam sidak tersebut Bupati Subandi juga menyalurkan bantuan beras kepada warga kurang mampu di sekitar lokasi. Program bedah rumah ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo dan Baznas Sidoarjo.

Melalui program ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat memberikan solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini tinggal di hunian yang tidak aman dan membahayakan keselamatan. • Loe

DUTA
MASYARAKAT

Ribuan ASN Komit Bangun Daerah dan Tingkatkan Pelayanan

SIDOARJO - Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengikuti Apel Akbar ASN 2026 yang digelar di Area Parkir Timur GOR Sidoarjo, Senin (12/1/26).

Apel dipimpin langsung Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dan diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran. Apel akbar ini menjadi momentum awal tahun untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh ASN dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa apel akbar merupakan simbol dimulainya langkah dan semangat baru di tahun 2026. Ia mengajak seluruh ASN memperkuat persatuan serta memberikan kinerja terbaik bagi bangsa dan masyarakat, khususnya warga Sidoarjo.

"Sebagai ASN, kita adalah pelayan publik. Tugas kita bukan sekadar menjalankan rutinitas, tetapi menghadirkan solusi, inovasi, dan pelayanan prima. Setiap masyarakat yang terlayani dengan baik adalah cerminan keberhasilan kita bersama," ujar Subandi.

Lebih lanjut, Bupati meminta agar tahun 2026 dijadikan momentum peningkatan disiplin dan etos kerja melalui semangat kebersamaan. Hal tersebut dinilai penting guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Subandi juga menekankan bahwa ASN Sidoarjo harus

menjadi garda terdepan dalam membawa perubahan. Menurutnya, profesionalisme kerja harus dibarengi dengan kepedulian sosial serta empati kepada masyarakat.

"Sidoarjo adalah rumah kita bersama. Kekuatan terbesar ASN terletak pada kebersamaan dan integritas. Dengan budaya kerja yang berintegritas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat," tambahnya.

Terkait dinamika organisasi, Bupati menjelaskan bahwa pelantikan pejabat yang baru saja dilaksanakan merupakan bagian dari rotasi dan penyegaran pegawai berbasis kompetensi. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja ASN di seluruh sektor.

Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan implementasi sistem merit yang adil dan transparan, di mana promosi dan penempatan jabatan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menutup arahannya, Bupati Subandi mengajak seluruh ASN Kabupaten Sidoarjo untuk terus memegang teguh prinsip kerja nyata dan pengabdian.

"Bekerjalah dengan ikhlas, berkarya secara tuntas, serta senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya. • Loe



LOE/L/DUTA

Apel Akbar ASN 2026 yang dilaksanakan di area parkir Timur GOR Sidoarjo, Senin (12/1/26)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati Subandi berdialog dengan ASN usai Apel Akbar 2026, Senin (12/1). foto: ist

Teguhkan Komitmen Bangun Daerah

Ribuan ASN Sidoarjo Ikuti Apel Akbar 2026

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo mengikuti Apel Akbar di GOR Sidoarjo, Senin (12/1). Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi dan dihadiri seluruh kepala OPD.

Apel Akbar ini digelar sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen para ASN dalam membangun Kabupaten Sidoarjo

menjadi lebih baik ke depannya.

Bupati Subandi mengatakan, Apel Akbar ini tanda dimulainya langkah baru di tahun 2026. Ia menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan memberikan karya terbaik bagi bangsa, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo.

Kata Subandi, sebagai ASN, kita adalah pelayan publik. Tugas kita bukan sekadar menjalankan rutinitas, melainkan menghadirkan solusi, inovasi, dan pelayanan prima bagi masyarakat.

"Ingatlah, setiap senyum warga yang terlayani dengan baik adalah pahala

sekaligus prestasi kita bersama," tandas mantan Ketua Komisi IV DPRD Sidoarjo ini.

Ia juga meminta agar tahun ini dijadikan momentum untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja melalui semangat kebersamaan. Target utamanya adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Subandi mengingatkan ASN Sidoarjo harus menjadi garda terdepan pembawa perubahan. Menurutnya, bekerja tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga harus disertai den-

gan hati dan empati yang tinggi.

"Sidoarjo adalah rumah kita. Kekuatan terbesar ASN adalah kebersamaan. Kita harus mampu membangun budaya kerja yang berintegritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kokoh," tambahnya.

Terkait dinamika organisasi, Bupati menjelaskan pelantikan pejabat yang baru saja dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo merupakan bagian dari rotasi pegawai berbasis kompetensi. Hal ini dilakukan untuk terus memacu kinerja ASN di berbagai lini. (sta/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

6 MALANG-SIDOARJO-GRESIK

DUTA MASYARAKAT
SELASA, 15 JANUARI 2026

Bupati Pastikan Jembatan Banjarsari Aman

Pekerja Docking Kapal —



AUDIENSI. Komisi IV DPRD Gresik menggelar audiensi untuk mendiskusikan pengaduan pekerja PT Indonesia Marina Shipyard, kemarin.

Wadhu! ke DPRD Gresik

GRESIK—Pengaduan permasalahan ketenagakerjaan dari Persatuan Karyawan PT. Indonesia Marina Shipyard (IMS) ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPRD Gresik dengan menggelar audiensi dengan dihadiri Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, dan pimpinan PT. Indonesia Marina Shipyard dan perwakilan dari persatuan karyawan IMS, kemarin.

"Pengaduan soal uang lembur yang belum dibayar, keterimbangan gaji, koperasi maupun BPJS baik BPJS kesehatan maupun Ketenagakerjaan," ujar Wali Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Pondra Priyo Utomo seusai audiensi.

Ditambahkan, ada sekitar 375 orang van-

Tanggapi Keluhan Retakan Aspal

SIDOARJO—Proyek pembangunan Jembatan Banjarsari di Kecamatan Buduran telah rampung sepenuhnya pada akhir Desember 2025. Jembatan yang dikerjakan sejak pertengahan Oktober 2025 tersebut kini sudah dibuka dan dapat dilalui berbagai jenis kendaraan.

Meski telah beroperasi, proses perapian sisa pekerjaan masih terus dilakukan. Saat ini, Jembatan Banjarsari juga masih berada dalam masa pemeliharaan selama enam bulan yang menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana (11/1/26).

Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung meninjau konstruksi jembatan tersebut pada Minggu kemarin dan mengkonfirmasi langsung ke kontraktor pelaksana (11/1/26).

"Pekerjaan yang dilakukan selama enam bulan terhitung sejak kontrak berakhir. Selama periode tersebut, segala bentuk kerusakan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya untuk diperbaiki," jelas Afif.

Rampung Tepat Waktu

Afif menambahkan, pembangun-

kerusakan kecil seperti keretakan aspal di sambungan antara jalan dan badan jembatan.

"Beberapa waktu lalu saya menerima aduan masyarakat terkait adanya keretakan di bagian jembatan ini," ujar Bupati Subandi Senin (12/1/26).

Menanggapi hal tersebut, Afif selaku kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan Banjarsari membenarkan adanya keretakan tipis pada lapisan aspal. Ia memastikan pihaknya segera melakukan perbaikan karena jembatan masih dalam masa pemeliharaan.

"Betul, saat ini masih dalam masa pemeliharaan selama enam bulan terhitung sejak kontrak berakhir. Selama periode tersebut, segala bentuk kerusakan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya untuk diperbaiki," jelas Afif.



Bupati Subandi saat sidak jembatan Banjarsari

nan Jembatan Banjarsari dikerjakan selama 75 hari kalender, terhitung sejak 15 Oktober hingga 30 Desember 2025. Ia menegaskan seluruh

pekerjaan telah diselesaikan tepat waktu sesuai masa kontrak.

"Seluruh pekerjaan selesai tepat waktu pada 30 Desember 2025. Saat

ini kami hanya melakukan perapian dan penyempurnaan di beberapa titik kecil agar hasilnya benar-benar maksimal," pungkasnya. • Loe

DUTA
MASYARAKAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPKB 147 Kendaraan Dinas Hilang, Pemkab Bikin Duplikat

Dari Temuan Badan Pemeriksa Keuangan

SIDOARJO—Sebanyak 147 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan dinas Pemkab Sidoarjo hilang. Dokumen itu tersebar di puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan. Pemkab berkoordinasi dengan polres untuk membuat duplikat dokumen.

Adanya BKBB hilang didasari temuan Badan Pe-

meriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 yang belum tuntas hingga kini. Awalnya, ada 334 dokumen yang tak ditemukan. Setelah dicari dan diusut, saat ini tinggal 147 BPKB yang masih hilang. Tidak saja dokumen kepemilikan roda dua. Namun juga mobil plat merah. Untuk motor umumnya merupakan kendaraan hasil pengadaan tahun 1990-an. Sedangkan mobil dinas sebagian dibeli tahun 2021, termasuk mobil pemadam kebakaran (Damkar).

Pusatkan Penyimpanan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Chusnul Inayati menyebut ada 147 unit yang belum beres secara administrasi. "Kami masih koordinasi dengan Polresta untuk penerbitan duplikat," katanya kemarin (12/1).

Menurut dia, pengurusan menunggu kelengkapan dokumen dari OPD pengguna kendaraan. "Kalau berkarsa lengkap, baru bisa kami ajukan ke Polres,"

ujarnya. Proses penerbitan BPKB duplikat memang mensyaratkan dokumen berlapis. Termasuk laporan kehilangan dari polisi, kartu induk BPKB, bukti penggunaan di media, hingga verifikasi fisik kendaraan di Samsat dan Polda

Untuk mencegah kasus serupa, BPKAD berencana memusatkan penyimpanan BPKB di Bidang Aset. Selama ini pengelolaan dokumen memang masih dilakukan secara manual dan tersebar di masing-masing OPD. (ful/hen)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

SARANA OPERASIONAL:
Mobil dinas kesehatan terparkir di halaman kantor. Pemkab akan menelusuri seluruh BPKB yang masih hilang.

Jawa Pos



BEROPERASI TERBATAS: Kontraktor akan memperbaiki Jembatan Banjarsari sebelum kendaraan besar diperbolehkan melintas.

Muncul Retakan di Jembatan Banjasari, Truk Barang Dilarang Melintas

SIDOARJO — Jembatan Banjarsari yang selesai dibangun akhir Desember 2025 mulai dioperasikan. Namun, masih motor dan mobil yang diperbolehkan melintasi akses tersebut. Sementara kendaraan besar seperti truk barang dilarang lewat seiring temuan adanya retakan jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo Makhrud mengatakan jika keretakan

harus diperbaiki dulu. Pemkab sudah berkoordinasi dengan kontraktor. "Hari Minggu (11/1) sudah ditinjau kontraktor," kata Makhrud.

Kontraktor Pelaksana Jembatan Banjarsari Afif mengaku siap memperbaiki. "Selama periode ini, segala bentuk kerusakan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya untuk diperbaiki," jelasnya.

Pembangunan Jembatan Banjarsari selesai 30 De-

seMBER 2025. Jembatan tersebut sebelumnya rusak akibat terendam air saat hujan deras. Jembatan yang jadi akses alternatif menuju sedati itu diperbaiki dan dinaikan sekitar satu meter.

Afif mengatakan kendaraan besar bisa lewat selepas perbaikan keretakan. "Saat ini agenda kami tinggal melakukan perapian dan penyempurnaan di beberapa titik kecil saja agar hasilnya maksimal," tuturnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

APARATUR SIPIL NEGARA



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PEMBINAAN: Bupati Subandi memberikan nasihat kepada ASN yang terlambat datang apel.

Telat Apel, Sembilan Pegawai Kena Tegur

SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi menegur sembilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin saat apel akbar di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, kemarin (12/1). Mereka datang terlambat ke lokasi acara.

ASN yang telat ditarik secara khusus. Mereka ditanya penyebab keterlambatannya. Bupati kecewa dan meminta mereka lebih tertib. "Kalau hal mendasar seperti apel saja tidak bisa disiplin, bagaimana mau mengawal target besar daerah," kata Subandi.

Apel diikuti ribuan ASN dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Acara itu digelar untuk menguatkan kembali kinerja ASN dalam mencapai target pembangunan 2026.

Menurut dia, target pembangunan akan dapat dicapai jika pimpinan OPD dan jajaran kompak dalam satu barisan. Subandi meminta sekretaris daerah (Sekda) untuk langsung membuat surat edaran terkait kedisiplinan ASN. "Ke depan tidak ada lagi toleransi. Yang melanggar akan ditindak," ujarnya. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dishub Ambil Alih Pengelolaan 208 Titik Parkir

Berlakukan Tarif Baru, Masih Pakai Jukir Lama

Mulai bulan ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo mengambil alih pengelolaan 208 titik parkir. Juru parkir (jukir) lama masih diandalkan untuk menata parkir. Selain menetapkan tarif baru, dishub juga membuka ruang pengaduan.

PENATAAN PARKIR DI KOTA DELTA

- Ada 208 titik yang dikelola pemkab
 - Gandeng jukir lama
 - Siapkan sistem pembayaran nontunai
 - Buka ruang pengaduan parkir
- Sumber: Dishub Sidoarjo



WAJIB TAAT ATURAN: Jukir di Jalan Gajah Mada memberikan karcis parkir pada pengunjung toko.

ADA sejumlah alasan yang mendasari perubahan tata kelola dari swasta. Selain meminimalisir keluhan masyarakat, pemkab juga ingin menambah pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, nantinya ada penambahan titik parkir dan perubahan sistem pembayaran ke nontunai.

Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki mengatakan pembayaran parkir berbasis QRIS segera diterapkan. Dengan model baru, harapannya lebih transparan."Tahun ini kami me-

nargetkan retribusi parkir sebesar Rp 13,5 miliar. Kami optimistis target itu bisa tercapai," ungkapnya.

Di memastikan jika pemkab tetap memberdayakan jukir lama. Mereka digandeng sebagai mitra dan dibina. Setiap jukir dilengkapi atribut resmi berupa rompi, ID Card dan karcis. "Kami masih masa transisi. Sehingga akan memperbanyak sidak untuk sosialisasi," tambah Budi.

Dishub mulai menyosialisasikan tarif baru parkir di Kota Delta. Untuk parkir tepi jalan roda dua dikenai Rp 2.000. Sedangkan sedan/minibus Rp 5.000. Budi mengingatkan masyarakat untuk melapor jika menemukan jukir yang meminta lebih dari tarif.

Salah satu warga Sidoarjo Suroso mengaku jika selama ini kerap mendapati tukang parkir yang tidak memberikan karcis. Praktik itu terjadi di beberapa titik dan sudah berulang kali. Dia meminta jukir ditertibkan. "Kesal jika melihat jukir yang tidak memberi karcis," katanya. (ful/hen)

Jawa Pos Dewan Usul Ganti Petugas Parkir

ANGGOTA Komisi C DPRD Sidoarjo Moh Nizar menyebut soal masih dipakainya jukir lama dalam sistem pengelolaan anyar. Nizar menilai kebijakan itu berisiko mengulang praktik lama. Menurutnya, para jukir lama sudah mengetahui celah permainan sehingga kebocoran sulit ditutup.

"Kalau mau bersih, seharusnya semua diganti dengan jukir baru," tegas Nizar. Dia berharap pemilihan jukir selektif. Sehingga, kebijakan yang baru tidak menimbulkan masalah seperti dulu.

Nizar juga mengingatkan potensi pendapatan parkir di Sidoarjo sangat besar jika dikelola dengan sistem yang

benar. Masih banyak titik-titik yang bisa digarap. Selama ini, banyak potensi PAD yang bocor karena pengawasan lemah dan pola lama terus dipertahankan. Nizar mendorong Dishub berani melakukan langkah ekstrem agar retribusi parkir benar-benar berdampak pada pendapatan. (ful/hen)



*Kalau mau bersih,
seharusnya semua
diganti dengan
jukir baru."*

Moh Nizar
Anggota Komisi C DPRD
Sidoarjo



*Tahun ini kami
menargetkan
retribusi parkir
sebesar Rp 13,5
miliar. Kami
optimistis target itu
bisa tercapai."*

Budi Basuki
Kepala Dishub Sidoarjo

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jembatan Banjarsari Buduran Rampung Dibangun

BUDURAN-Proyek pembangunan Jembatan Banjarsari di Kecamatan Buduran telah rampung sepenuhnya pada akhir Desember 2025. Jembatan yang dikerjakan sejak pertengahan Oktober 2025 tersebut kini sudah dibuka dan dapat dilalui berbagai jenis kendaraan.

Meski telah beroperasi, proses perapian sisa pekerjaan masih terus dilakukan. Saat ini, Jembatan Banjarsari juga masih berada dalam masa pemeliharaan selama enam bulan yang menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, Bupati Sidoarjo Subandi, turun langsung meninjau kondisi jembatan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati meminta pihak kontraktor segera merespons setiap keluhan masyarakat, khususnya terkait kerusakan ringan seperti keretakan aspal pada sambungan antara jalan dan badan jembatan.

“Beberapa waktu lalu saya menerima aduan masyarakat terkait adanya keretakan di bagian jembatan ini,” ujar Subandi saat mengonfirmasi langsung kepada kontraktor pelaksana di lokasi.

Menanggapi hal tersebut, Afif selaku kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan Banjarsari mengakui adanya keretakan tipis pada lapisan aspal. Ia memastikan pihaknya akan segera melakukan perbaikan karena jembatan masih dalam masa pemeliharaan.

“Benar, saat ini masih dalam masa pemeliharaan selama enam bulan terhitung sejak kontrak berakhir. Selama periode tersebut, segala bentuk kerusakan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya,” jelas Afif.

Ia menambahkan, pembangunan Jembatan Banjarsari dikerjakan selama 75 hari kalender, terhitung mulai 15 Oktober hingga 30 Desember 2025. Seluruh pekerjaan, kata dia, diselesaikan tepat waktu sesuai masa kontrak.

“Pekerjaan selesai sesuai target pada 30 Desember. Saat ini kami hanya melakukan perapian dan penyempurnaan di beberapa titik kecil agar hasilnya lebih maksimal,” pungkasnya. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SELASA, 13 JANUARI 2015

Cegah Bullying dan Dampak Negatif Gadget ke Siswa SD

TAMAN—Upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah serta dampak negatif penggunaan gadget pada anak usia sekolah terus digencarkan. Kali ini, Bhabinkamtibmas Desa Tanjungsari, Polsek Taman, Polresta Sidoarjo, Aipda Dwi Priyo, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan imbauan di SDN Tanjungsari 2, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Senin (12/1).

Kegiatan tersebut menasaskan kepada kepala sekolah dan seluruh dewan guru. Materi sosialisasi difokuskan pada bahaya bullying di lingkungan pendidikan serta pengaruh buruk penggunaan gadget dan game online yang mengandung unsur kekerasan terhadap perkembangan karakter dan psikologis anak.

Aipda Dwi Priyo mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk peran aktif kepolisian dalam mendukung dunia pendidikan agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Menurutnya, pencegahan bullying dan kecanduan gadget perlu dimulai sejak dini melalui edukasi kepada tenaga pendidik.

"Bullying dan kecanduan gadget merupakan masalah serius yang dapat berdampak jangka panjang terhadap psikologis dan perilaku anak. Melalui sosialisasi ini, kami berharap para guru lebih peka, berperan aktif dalam pengawasan serta pembinaan terhadap siswa," ujar Aipda Dwi Priyo.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak sekolah, orang tua, dan kepolisian dalam mengawasi aktivitas anak, khususnya terkait penggunaan gadget serta akses game online yang tidak sesuai dengan usia. Dengan kerja sama yang baik, potensi terjadinya penyimpangan perilaku pada anak dapat diminimalkan.

Sementara itu, Kepala SDN Tanjungsari 2 Taman, Lukman Hadianta, mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Tanjungsari. Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah ter-



PENCEGAHAN: Bhabinkamtibmas Desa Tanjungsari, Polsek Taman melaksanakan kegiatan sosialisasi dan imbauan di SDN Tanjungsari 2, Kecamatan Taman.

hadap isu bullying di lingkungan pendidikan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sosialisasi dan imbauan ini. Bullying menjadi perhatian serius pemerintah, dan kegiatan ini merupakan bekal penting bagi kami para guru untuk mencegah terjadinya bullying maupun kecanduan gadget dan game online pada siswa," tutur

Lukman Hadianta.

Lukman juga mengapresiasi kinerja Bhabinkamtibmas Desa Tanjungsari yang aktif turun langsung ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Ia berharap kegiatan sosialisasi serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan demi menciptakan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berakhhlak mulia. (sur/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pembangunan Koperasi Merah Putih Sudah Berada di Tanah Aset Desa

KRIAN-Penolakan sebagian warga Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di atas lapangan desa setempat mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Sidoarjo menegaskan bahwa pembangunan KDMP telah melalui seluruh tahapan dan mekanisme yang berlaku, termasuk pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Kepala Dinkop UM Sidoarjo, Edi Kurniadi, menilai penolakan tersebut dipicu oleh kurangnya pemahaman sebagian kecil warga terhadap program yang dijalankan pemerintah. "Sebagian kecil saja. Artinya ada sekelompok masyarakat yang

● Ke Halaman 10



DILANJUT: Kepala DinkopUM Sidoarjo, Edi Kurniadi, bersama Babinsa dan perangkat desa meninjau langsung lapangan yang akan dibangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Senin (12/1).

 **RADAR**
SIDOARJO.ID

Pembangunan Koperasi...

"Kurang paham dan perlu diberikan penjelasan. Insyaallah tidak ada masalah," ujar Edi kepada Radar Sidoarjo, Senin (12/1).

Menurut Edi, pihaknya bersama aparat kewilayahan telah turun langsung ke lokasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ia menegaskan persoalan yang muncul lebih disebabkan oleh komunikasi yang belum optimal, bukan pelanggaran prosedur.

"Tadi saya bersama Babinsa sudah berupaya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi ini hanya soal kurang komunikasi," katanya.

Edi juga menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan KDMP telah melalui koordinasi lintas pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga instansi terkait di tingkat kabupaten.

"Sebelum penentuan titik ini, Dan-

ramil sudah berkoordinasi dengan desa, kecamatan, dan kami. Ini juga sudah melalui Musdesus. Kalau sudah Musdesus, itu merupakan keputusan tertinggi di desa," tegasnya.

Ia membantah anggapan bahwa pembangunan KDMP merupakan bentuk tukar guling fasilitas umum. Menurutnya, lahan yang digunakan merupakan Tanah Aset Desa (TAD) dengan status lahan siap bangun.

"Ini bukan fasilitas umum, melainkan Tanah Aset Desa. Bukan sawah, bukan LP2B, dan bukan Lahan Sawah Dilindungi. Jadi tahapannya sudah benar," jelas Edi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemanfaatan Tanah Aset Desa diperbolehkan untuk berbagai kegiatan pembangunan desa, termasuk koperasi sebagai bagian dari program strategis nasional.

"Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan Proyek Strategis Nasional

(PSN) yang harus kita dukung sesuai arahan Presiden Prabowo. Program ini memang diimplementasi di Tanah Aset Desa yang siap dibangun," ungkapnya.

Di kawasan tersebut, lanjut Edi, juga direncanakan pembangunan fasilitas penunjang lain seperti lapangan voli dan sarana aktivitas warga. Terkait sosialisasi, ia memastikan Musdesus telah dilaksanakan lebih dari satu kali, dengan pertemuan terakhir pada 17 Desember lalu. "Musdesus dilakukan beberapa kali, bukan hanya sekali. Terakhir tanggal 17 Desember dan sudah disepakati lokasi ini," ujarnya.

Menambahkan, Musdesus memang tidak mengundang seluruh warga secara langsung, melainkan melalui perwakilan kelompok masyarakat.

"Yang diundang biasanya perwakilan, seperti karang taruna, PKK, dan kelompok masyarakat lainnya. Tidak mungkin semua warga diundang," katanya.

Edi memastikan pembangunan

KDMP akan tetap berlanjut karena seluruh tahapan telah dipenuhi sesuai ketentuan.

"Pembangunan tetap berjalan karena mekanismenya sudah benar. Kami bersama para pemangku kepentingan, TNI, Dinas PMD, dan Pemkab akan turus melakukan sosialisasi," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penolakan warga ditunjukkan dengan pemasangan spanduk di pintu masuk

lapangan desa pada Minggu (11/1). Spanduk bertuliskan "#masyarakat peduli desa, kembalikan lapangan Sidorejo seperti semula" tersebut mencerminkan kekecewaan warga yang merasa tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan.

Hingga kini, lapangan desa tersebut masih aktif digunakan warga sebagai lapangan sepak bola dan pusat berbagai kegiatan sosial masyarakat. (dik/vga)

Iklan Baris
Delta Cekli

KEHILANGAN

TELAH HILANG STNK SEPAH MOTOR VARIO TAHUN 2015
WARNA HITAM W6794 NBH...AN M. ROCHIM ALAMATTAMBAK
SARI RW 02 RT 04 SDA IDS TAMBAK REJO 0896-5073-2900

PASANG
IKLAN CEKL?

HUB: 08132000162 (IMAS)

 **RADAR**
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Tak Ingin Terburu-buru Isi Jabatan Kepala DLHK yang Kosong



KOORDINASI: Bupati Sidoarjo Subandi usai menggelar apel akbar ASN di GOR Sidoarjo, Senin (12/1).

KOTA-Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo hingga kini masih belum terisi. Kekosongan tersebut terjadi setelah M. Bahrul Amig dimutasi menempati posisi Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi memastikan roda organisasi di DLHK tetap berjalan normal. Untuk semestinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sembari menyiapkan proses penilaian atau assessment bagi pejabat yang berpotensi

mengisi jabatan kepala dinas secara definitif.

"Ya, nanti DLHK ini kita Plt dulu. Karena tahun 2026 ini kan banyak yang pensiun," ujar Subandi, Senin (12/1) usai menggelar apel akbar ASN di GOR Sidoarjo.

Subandi menegaskan, pengisian jabatan Kepala DLHK tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Ia ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pejabat eselon yang memenuhi persyaratan untuk berkompetisi secara sehat. "Biarkan kita memberikan kesempatan seluas-luasnya, mulai dari eselon yang bisa mencalon-

kan. Nanti biarkan kita bisa memilih," tegasnya.

Menurut Subandi, pejabat yang akan dipilih harus memiliki kompetensi menyeluruh, tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga integritas, loyalitas, empati, serta kemampuan manajerial.

"Kalau memilih itu juga orang yang pintar, yang loyal, yang empati, yang mampu mengelola. Nanti biarkan ada assessment. Harapannya seperti itu," jelasnya.

Selama masa transisi, koordinasi dan pengawasan DLHK akan berada di bawah Sekretaris.

• Ke Halaman 10

Bupati Tak Ingin...

Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini diambil agar seluruh pro-

gram dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

"Untuk sementara masih dikoordinasikan dengan Bu Sekda, yang bisa

berkomunikasi dengan DLHK seperti apa. Nanti kita assessment dulu, agar kegiatan tetap bisa berjalan dengan baik," imbuh Subandi.

Diketahui sebelumnya, Bupati Sidoarjo Subandi kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pelantikan

sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut digelar pada Sabtu (10/1) pagi di Pendapa Delta Wibawa. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DLHK Sidoarjo Perluas Lahan Parkir Alun-alun Atasi Permasalahan Parkir

Sidoarjo, Jawa Timur

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menyatakan penambahan lahan parkir Alun-Alun Sidoarjo dapat mengatasi masalah ketidakaturan parkir di kawasan setempat.

"Area parkir sudah kami siapkan dan diperluas, pengelolaan sepenuhnya kami serahkan kepada Dishub Sidoarjo," kata Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Tata Hijau DLHK Sidoarjo, Heri Santoso di Sidoarjo, Senin.

Heri menyatakan, Pemkab Sidoarjo melalui DLHK Sidoarjo telah mempertimbangkan aspek lahan parkir atas fasilitas umum (fasum) tersebut secara matang sejak tahap perencanaan revitalisasi Alun-alun Sidoarjo guna mengakomodir parkir para pengunjung agar tertata lebih rapi.

Menurutnya, DLHK Sidoarjo telah meningkatkan kapasitas parkir di kawasan sekitar Alun-Alun Sidoarjo dengan salah satu titik parkir utama yang berada di depan Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo yang kondisinya telah diperlebar dengan panjang area parkir di setiap sisi mencapai 180 meter.

Selain itu, DLHK Sidoarjo juga telah menyiapkan sejumlah kantong parkir di sisi barat dan selatan kawasan alun-alun tersebut telah melalui perhitungan satuan ruang parkir guna menampung kendaraan pengunjung.

Ia menyoroti bahwa permasalahan parkir di sekitar fasilitas umum di Sidoarjo, terutama di wilayah Alun-Alun Sidoarjo, merupakan permasalahan yang kerap muncul sehingga mengakibatkan penumpukan kendaraan serta ketidakaturan parkir di kawasan sekitar. [ant.fen]

HARIAN
Bhirawa
Buletin Buletin Buletin